

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA : Mendorong Kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Pemateri :

1. Prof. dr. Ascobat Gani, MPH, Dr.PH, Anggota Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19
2. Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA, Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Vunny Wijaya, MA, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute

Moderator : Rifqi Rachman, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute.

Partisipan : Diskusi ini dilaksanakan secara onlien via zoom, dan diikuti oleh sebanyak 20 peserta dengan berbagai latar belakang disiplin dan organisasi yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Vunny Wijaya, MA, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute

- ✓ Banyak apresiasi yang bagus, namun kinerja GTPP COVID-19 masih dipertanyakan diantaranya terkait pelayanan fasilitas kesehatan yang diberikan, keterbukaan soal informasi, keakuratan data pasien, dan lain sebagainya..
- ✓ Sebanyak 55 persen mengatakan cukup puas dengan kinerja Gugus COVID-19 dan Sebanyak 8,7 persen mengatakan sangat puas, 24 persen kurang puas, dan tidak puas sama sekali sebanyak 1,9 persen, serta tidak tahu/tidak menjawab sebanyak 10,4 persen.
- ✓ Penyerapan anggaran kesehatan terkait dengan pemulihan akibat pandemi covid-19 meningkat dari 4,68% per 24 Juni 2020 menjadi 5,12%.
- ✓ Kendala dalam mendistribusikan anggaran yaitu proses perubahan pagu ataupun kendala teknis di lapangan, seperti keterlambatan klaim biaya perawatan dan insentif tenaga kerja kesehatan.
- ✓ Ada kesalahan komunikasi kepada masyarakat dari pihak gugus tugas yang membuat publik menjadi panik seperti kasus pertama kali COVID-19 yang sempat heboh.
- ✓ Informasi yang baik perlu ditopang pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan terkait COVID-19
- ✓ Salah satu media yang paling berbahaya atau tertutup sifatnya adalah seperti grup WA dan hal ini menimbulkan banyaknya hoax.
- ✓ Dalam konferensi pers laporan kerja bulan kedua, Widodo Muktiyo, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyampaikan bahwa terdapat 686 hoaks per 13 Mei 2020 -> Perlu mengkampanyekan *positive knowledge*.
- ✓ Peningkatan produksi Alat Kesehatan (Alkes) Alat Pelindung Diri (APD), PCR, ventilator dll dalam negeri melalui kolaborasi juga dengan negara lain.
- ✓ Perlu mempertimbangkan mengenai sangsi pelanngar PSBB dan perlunya sosialisasi atau Promosi Kesehatan (Promkes) dan Pemberdayaan Masyarakat melalui pendekatan edukasi perlu secara berkelanjutan dilakukan.
- ✓ Dengan diikuti pemanfaatan berbagai media seperti leaflet dll dan juga penggunaan istilah yang lebih mudah dipahami masyarakat dan tidak menimbulkan ambiguitas.
- ✓ Pelaporan kerja bulanan dilakukan oleh Gugus COVID-19, selain briefing harian untuk mengupdate kondisi terkini COVID-19.
- ✓ Ekosistem inovasi mendorong transparansi laporan keuangan Pemda sebagai pertanggungjawaban informasi publik kepada masyarakat setempat.

Prof. dr. Ascobat Gani, MPH, Dr.PH, Anggota Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19

- ✓ Terjadi dilemma antara penanganan COVID-19 dan Ekonomi, misalnya kasus di Korea dan Cina ketika danya pelanggaran ternyata munculnya kasus gelombang kedua. Termasuk di DKI Jakarta juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
- ✓ Adanya tantangan untuk menemukan titik optimal untuk mengatasi COVID-19 dan juga ekonomi.
- ✓ Lemahnya koordinasi antara lembaga dalam risk communication kepada masyarakat. Dan juga Fragmentasi penanganan covid antara lembaga (kementerian dan non kementerian).
- ✓ Alhasil, peran kementerian menjadi tenggelam oleh peran-peran lembaga non-kementerian
- ✓ Disiplin masyarakat yang rendah dalam melaksanakan protocol kesehatan akibatnya terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia.
- ✓ Lemahnya dan tidak konsisten peran aparat dalam melakukan enforcement protocol kesehatan
- ✓ Muncul Perpres-82 Tahun 2020 (20 Juli 2020). Dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional dan Daerah. Hal ini menunjukkan adanya intergrasi dalam penugasan. Dan juga dibentuk Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional
- ✓ Perlu adanya indikator pengendalian COVID-19 dalam proses dan situasi COVID)19 dalam bentuk output.
- ✓ Perlu adanya indikator penanganan kegiatan ekonomi (proses) dan situasi ekonomi (output).
- ✓ Beberapa indikator penanganan ekonomi: investasi, employment, dan konsumsi serta saving.
- ✓ Beberapa Indikator penangan COVID-19 Skrinning/testing, tracing, dan isolasi serta treatment
- ✓ Diperlukannya wadah untuk menampung indikator-indikator (Dashboard Data) supaya dapat dikendalikan implementasinya, dan juga diawasi pelaksanaannya.
- ✓ Oleh sebab itu, maka pemerintah perlu melakukan penetapan kriteria kapan perlu dilakukan intensitas kegiatan ekonomi dan juga intensitas pengendalian COVID-19
- ✓ Perlu menetapkan titik optimal intervensi ekonomi dan intervensi penanganan COVID-19 di masing-masing daerah.
- ✓ Perlu adanya operasional dan eksekusi kebijakan baik oleh kementerian/lembaga terkait dan juga oleh daerah atau satgas daerah

Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA, Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- ✓ Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No 9 Tahun 2020 **dicabut** dan dinyatakan tidak berlaku.
- ✓ Gugus Tugas Covid-19 dibubarkan sejak dikeluarkan Peraturan Presiden No 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional per *tanggal 20 Juli 2020*.
- ✓ Pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Covid-19 dan Gugus Tugas Covid-19 Daerah selanjutnya dilaksanakan oleh Komite Kebijakan dan/atau Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
- ✓ Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tidak disebutkan aspek kesehatan, melainkan hanya aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tentu hal ini menjadi pertanyaan besar.
- ✓ Kemudian, tugas komite penangan COVID-19 ini belum memiliki tujuan yang diatur secara detail.
- ✓ Dari susunan Komite Penanganan COVID-19 ini juga masih memiliki intensi adanya ego sektoral dari masing-masing kepala badan yang memimpin.
- ✓ Diharapkan Komite Penanganan COVID-19 menjadi semakin bersinergi sebab sudah dipimpin oleh menteri Koordinator dan diharapkan dapat menambahkan integritas kinerja kementerian terkait.

- ✓ Masih banyaknya anggaran yang berada di luar kementerian sehingga proses realisasi anggaran pun menjadi tersendat ditambah dengan adanya proses administrasi yang rigid.
- ✓ Secara umum, Gugus Tugas COVID-19 sudah melaksanakan tugasnya secara baik dan maksimal sesuai amanat Keppres, meski masih ada beberapa catatan penting, antara lain terkait penyerapan anggaran dan koordinasi antar K/L maupun Pemda yang masih lemah
- ✓ Gugus Tugas COVID-19 dalam penyampaian informasi rutin ke publik tidak saja mengumumkan jumlah pasien positif, sembuh dan meninggal dunia, namun harus menjelaskan bagaimana terobosan kebijakan agar pandemi COVID-19 bisa terkendali.
- ✓ Harapan kepada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional agar dapat bekerja sesuai tugasnya secara cepat dan terkoordinasi lebih baik dengan tetap memperhatikan sektor.

FORUM DISKUSI

1. **Arfianto Purbolaksono – Manager TII pada Prof. Gani.**
Apakah silo mentality menjadi hambatan utama? karena jika komite akan bekerja ke depan apakah hal ini sama saja hambatannya?
2. **Arfianto Purbolaksono – Manager TII pada Nihayatul**
Bagaimana pola pengawasan DPR kepada Komite?
3. **Rifqi Rachman – Peneliti Politik TII kepada Prof Gani**
Bagaimana proyeksi kinerja Komite Penanganan COVID-19?
4. **Rifqi Rachman – Peneliti Politik TII kepada Vunny Wijaya**
Bagaimana proyeksi kinerja Komite Penanganan COVID-19?
5. **Rifqi Rachman – Peneliti Politik TII kepada Nihayatul**
Agenda parlemen ke depan untuk menanggapi perpres 82?

Tanggapan

1. **Prof. dr. Ascobat Gani, MPH, Dr.PH, Anggota Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19**
Perlu adanya penemuan titik optimal yang membuat ekonomi tetap berjalan dan juga tetap menjaga kesehatan. Tugas komite ada penting untuk menghapuskan ego sectoral dan juga silo mentality. Memang tidak mudah akan tetapi hal ini perlu dilakukan karena untuk menangani COVID-19 ini memerlukan sinerginitas. Selain itu perlu adanya enforcement untuk penegakkan ke depannya.
2. **Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA, Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**
Pola ini dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan baik misalnya Kerjasama dengan kementerian dan juga gugus tugas COVID-19. Serta DPR juga sudah memiliki satuan tugas untuk melakukan pengawasan.

Sejauh ini masih belum ada lanjutan pembahasan dari aturan perpres yang baru mengigit perpres ini masih bersifat baru. Akan tetapi kedepannya tetap akan dilaksanakan proses sesuai dengan prosedur dan arahan yang dibutuhkan.

3. **Vunny Wijaya, MA, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute**
Perlu adanya yang diperhatikan bagaimana penugasan yang detail. Perlu danya inovasi yang perlu dikembangkan juga di daerah masing-masing. Efektivitas dipengaruhi oleh permasalahan kesehatan

di luar COVID-19 yang juga perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, adanya Satgas ini dapat memberikan integrasi yang baik untuk penanganan kasus di luar COVID-19

Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIA FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".*

~ TERIMA KASIH